

EKSPLOITASI MURIA: PERUBAHAN EKOLOGI DI LERENG MURIA JEPARA PADA AKHIR ABAD XIX SAMPAI AWAL ABAD XX

Arif Akhyat

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

Email: arief.fib@ugm.ac.id

ABSTRAK

Pada akhir abad XIX dan memasuki abad XX, praktik-praktik kapitalisme berbasis industri di Jepara berdampak pada luasnya kerusakan lingkungan. Eksploitasi tanaman jati sebagai bahan material industri tidak hanya mengakibatkan terjadinya kebencanaan lingkungan di sekitar lereng Muria, namun juga merembet ke persoalan tanaman produksi sebagaimana kopi yang rusak akibat penebangan tanaman jati secara tradisional. Eksploitasi alam di lereng Muria tidak hanya mengakibatkan banjir, namun juga hancurnya habitat flora dan fauna. Dibalik kerusakan lingkungan di lereng Muria, tidak serta merta memunculkan persoalan social-ekonomi di kalangan petani dan pekebun.

Artikel ini bertujuan menjelaskan proses kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lahan di lereng Muria yang berakibat kebencanaan, baik kebencanaan alam maupun lingkungan social serta bagaimana reaksi social di kalangan komunitas local. Oleh karena itu artikel ini juga ingin menjelaskan mengapa komunitas local dapat bertahan di tengah-tengah kebencanaan yang menghantamnya.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah dengan melakukan desk study terhadap arsip terutama peta kerusakan, buku-buku sezaman, dan literatur sekunder. Kajian sejarah local merupakan perspektif yang digunakan untuk menjelaskan variable kebencanaan dan reaksi adaptif dari komunitas local.

Hasil temuan kajian ini menunjukkan bahwa komunitas desa sebagai korban bencana memiliki kemampuan adaptif secara ekonomi dengan melakukan konversi pekerjaan, dari petani dan pekebun menjadi buruh industri di kota. Reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, hanya sebagai penyelamat kepentingan kolonial.

Kata Kunci: Muria, eksploitasi, perubahan ekologi, adaptif, Jepara.

ABSTRACT

At the end of the Nineteenth century and into the Twentieth century, the practices of industrial-based capitalism in Jepara had an impact on widespread environmental damage. The exploitation of teak plants as industrial materials has not only resulted in environmental disasters around the slopes of Muria, but has also spread to problems with production crops such as coffee which have been damaged due to traditional felling of teak plants. Exploitation of nature on the Muria slopes has not only resulted in flooding, but also the destruction of flora and fauna habitats. Behind the environmental damage on the slopes of Muria, it does not necessarily give rise to socio-economic problems among farmers and planters

This article aims to explain the process of environmental damage due to land exploitation on the slopes of Muria which results in disasters, both natural and social environmental disasters as well as social reactions among local communities. Therefore, this article also wants to explain why local communities can survive amidst the disasters that hit them.

The method used in this article is the historical method by conducting a desk study of archives, especially damage maps, contemporary books and secondary literature. Local historical studies are a perspective used to explain disaster variables and adaptive reactions from local communities

The findings of this study show that village communities as disaster victims have the ability to adapt economically by converting jobs, from farmers and planters to industrial workers in the city. Reforestation carried out by the colonial government was only to save colonial interests.

Keywords: *Muria, exploitation, ecological changes, adaptive, Jepara.*

PENDAHULUAN

Proses ekologi dalam sejarah dataran tinggi di Jawa pada masa kolonial mengalami perubahan yang penting pada akhir abad XIX. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya bagaimana munculnya pergerakan komunitas dari dataran rendah menuju ke dataran tinggi atau sebaliknya berbasis sumber ekonomi lahan lereng pegunungan, namun juga ditandai perubahan geografis-ekologis yang mengikuti pola perubahan ekonomi (Hefner, 1990). Hefner lebih menitikberatkan perubahan social dan politik sebagai determinan terjadinya perubahan struktur geografis-ekologis, termasuk perubahan pola konversi keagamaan. Namun, Hefner belum selesai menjelaskan bagaimana perubahan ekologi menjadi determinan perubahan sosial pada kawasan yang selama ini tereksplorasi secara social-ekonomi maupun geo-ekologinya. Atau lebih jauh, apakah perubahan ekologi tidak memberikan daya dorong terhadap perubahan social-ekonomi?

Pertanyaan tersebut memberikan ilustrasi penting apakah dalam konteks sejarah, perubahan ekologi dengan keragaman perubahannya menyebabkan signifikansi perubahan social ekonomi? Salah satu wilayah lereng pegunungan yang mengalami perubahan ekologi, baik akibat bencana maupun alih fungsi lahan, adalah Desa Tempura atau Tempuran yang berada di Kabupaten Jepara. Dalam perkembangannya, Tempuran ini kemudian berubah menjadi Tempur. Tempur, yang merupakan desa di Kecamatan Keling, Jepara merupakan desa yang terletak di atas 225 dpl merupakan desa yang tepatnya di lereng Gunung Muria bagian Utara. Letak geografis Desa Tempur ini memiliki potensi kebencanaan paling tinggi di Kabupaten Jepara selama 15 tahun terakhir (Annisa, 2019). Pada masa kolonial, kebencanaan memang tidak pernah lepas dari Desa Tempur, namun tidak separah yang terjadi pada masa pasca-kemerdekaan. Sebab yang paling dominan terjadinya bencana tersebut, lebih ditentukan oleh letak kemiringan dengan tebing curam, perambahan pohon jati karena peningkatan produktivitas industri mebel, dan juga oleh program reboisasi yang gagal. Bagi komunitas lereng Muria, pemanfaatan lahan lereng Desa Tempur sebagai lahan produktif dimulai sejak sebelum kehadiran komunitas Eropa dengan tanaman keras, pohon jati, sebagai tanaman produktif sekaligus konservasi. Hal ini yang tampaknya memperlambat proses kebencanaan, pola tanam tumpang sari dengan kopi memberikan sumber ekonomi yang cukup bagi komunitas Desa Tempur.

Di Jepara, pada akhir abad XIX dan memasuki awal abad XX, peningkatan kebutuhan kayu jati sebagai bahan dasar industri mebel meningkat. Hal ini menjadi sebagai penyokong utama berkurangnya luasan hutan jati dan sebagai salah satu sebab paling berdampak pada tanah longsor (Muhajirin, 2018; Gustami, 2000). Walaupun upaya untuk mengatasi berkurangnya luasan lahan tanaman jati itu oleh Pemerintah Kolonial didatangkan beberapa buruh dari Semarang dan kemudian mereka diwajibkan tanam kopi (Akhyat, 2022). Penanaman kopi lebih massif dipimpin oleh missionaris Hazeoo yang dikendalikan dari Desa Bondo. Namun kekuatan tanaman kopi sebagai pelindung tanah dari bencana longsor tidak cukup efektif karena banyak tanaman kopi rusak akibat terjangan batangan kayu jati hasil tebangan dari daerah lereng Muria Atas. Kopi yang sebelumnya digunakan sebagai tanaman konservasi sekaligus sebagai tanaman produksi akhirnya tidak berfungsi dengan baik (Wolterbeek, 1995, *Topographische kaart der residentie Japara*, sheet 3). Pilihan kopi, disamping memiliki nilai ekonomi tinggi dengan durasi panen yang rata-rata 4-5 bulan, juga merupakan lahan pekerjaan bagi komunitas Hozeoo yang mulai menempati di Desa Bondo. Berbeda dengan kopi, tanaman jati membutuhkan jangka waktu tebang puluhan sampai ratusan tahun, sehingga kurang memberikan nilai ekonomi jangka pendek bagi komunitas pedesaan sekitar lereng.

Pemerintah kolonial dalam menghadapi persoalan tanah longsor disamping dengan pohon jati yang tersisa, tanaman kopi baru, juga dilakukan program reboisasi di wilayah lereng dan *oro-oro* (daerah gundul). Program reboisasi itu tidak berhasil karena tanaman-tanaman yang dijadikan program reboisasi merupakan tanaman produksi. Hal itu juga mengakibatkan penebangan kembali terjadi. Oleh karena itu, masih banyak tanah kosong akibat penebangan di beberapa wilayah lereng Muria (*Topographische kaart der residentie Japara*, sheet 3)

Penanaman kopi sebagai pengganti pohon jati pun tidak cukup efektif karena kurangnya tenaga kerja dan pemeliharaan. Sementara itu, pada tahun 1880-an kebutuhan akan kayu jati semakin meningkat dan untuk mengatasi kebutuhan jati itu kemudian diimpor dari Rembang. Perubahan terjadi ketika hadirnya kelompok misionaris yang menempati Desa Bondo sebagai “Desa Kolonial”. Kebutuhan akan sumber ekonomi bagi penduduk desa yang mayoritas mengalami konversi agama, dari Islam ke Kristen, dan atau dari agama yang disebut Hozeoo sebagai agama *abangan* berubah menjadi Kristen, maka Pemerintah Kolonial melalui kelompok misionaris melakukan program perkebunan kopi di wilayah Tempur yang memang merupakan desa di Jepara yang paling banyak tanaman kopi sejak masa pra-kolonial, di samping pohon jati. Program penanaman kopi ini bersamaan dengan program reboisasi yang dilakukan Residen Jawa dan Madura, yang berkedudukan di Semarang. Di samping Hozeoo, Jellesma juga melakukan kegiatan *zending* di sekitar Muria. Dua tokoh penting yang pernah melakukan *zending* ke Jepara adalah Kyai Tunggul Wulung dan Kyai Sadrach. *Zending* tersebut berhasil meng-“Kristen” kan Sebagian wilayah Jepara bagian Utara (Wolterbeek, 1995; Akhyat, 2022).

Penanaman dua komoditas, jati dan kopi, di Desa Tempur sebagai cara mengatasi kebencanaan dan sekaligus sebagai sumber ekonomi komunitas lereng Muria, sampai awal abad XX tidak memberikan hasil yang memadai (Akhyat, 2022). Hal tersebut

menunjukkan kompleksitas kehidupan social ekonomi komunitas desa yang berada di dalam dua ekologi berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat reaksi komunitas desa yang mengalami hidup secara social ekonomi berada dalam dua ekologi, jati dan kopi. Sebuah proses sejarah desa yang luput dari sejarawan.

Perubahan yang terjadi bukan hanya persoalan ekonomi dan ekologi tetapi kemudian juga menyangkut persoalan kebijakan yang tumpang tindih terkait tatakelola ekosistem lereng pegunungan. Oleh karena itu, dalam batas tertentu, komunitas desa kemudian tidak banyak memberikan perhatian dan ketergantungan dengan sumber ekonomi jati dan kopi.

Artikel ini ingin menjawab pertanyaan pokok, kecenderungan responsitas seperti apa yang dilakukan komunitas desa dalam menghadapi perubahan ekologi di wilayah lereng ketika mereka dalam dua ekologi yang berbeda?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih merupakan penelitian Sejarah dengan mengambil batas kajian wilayah lereng Gunung Muria. Temporal yang digunakan pada akhir abad XIX sampai awal abad XX. Kesulitan untuk menetapkan batas temporal dengan tepat merupakan kesulitan tersendiri dalam penelitian ini. Oleh karena itu, batas temporal lebih menggunakan batasan abad sebagai cara yang aman untuk kepentingan metodologi.

Sebagai kajian Sejarah, arsip menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi data factual. Kajian ini sangat disulitkan dengan data-data primer terutama arsip kolonial maupun sumber tempatan. Hal ini dikarenakan kasus yang diteliti merupakan kasus awal yang belum pernah memperoleh perhatian dari sejarawan. Arsip peta, sebagaimana *Topographische kaart der residentie Japara, Catalogus der Lichtenbeelden-verzameling van de Koninklijke Vereeniging Kolonial Institute* yang merupakan peta digital dari *leiden digital collection* sangat penting untuk mengisi kekosongan arsip tentang Muria. Sumber-sumber berupa disertasi maupun laporan-laporan penelitian menjadi pelengkap dalam mengulas berbagai persoalan di sekitar lereng Muria. Di samping itu, penerbitan khusus terkait penanaman kopi, jati dan kebencanaan sebagaimana *Kolonial Studien, Natuurlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte, Statistiek der Residentie Japara, Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, menjadi sumber penting bagaimana kebencanaan tidak hanya berdampak pada kerusakan, namun dibalik itu ada proses social yang unik, strategi adaptif.

Berbagai fakta setelah diperoleh, kemudian dilakukan validasi dengan kajian literatur-literatur untuk menganalisis atau menginterpretasi dan merekonstruksi fakta, baik fakta yang kuat (*hard fact*) maupun fakta lunak (*soft fact*) yang menjadi pokok penelitian ini. Keunikan narasi, menjadi perhatian utama dalam menjelaskan proses eksploitasi sumber daya alam lereng Muria, sehingga hasil tulisan ini tidak hanya unik, namun memiliki kekuatan kritis dalam sejarah lingkungan. Proses rekonstruksi sebagai proses menghadirkan sebuah narasi sejarah menjadi akhir dari metode penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi di Muria

Muria adalah nama sebuah gunung di Pantai Utara Jawa dengan ketinggian kira-kira 4.000 kaki (1.219, 2 m) dpl. Pada perkembangannya ketinggian gunung ini diperkirakan mencapai lebih dari 1.600 m/dpl. Gunung Muria ini sebenarnya tidak hanya satu puncak, tetapi terdiri dari beberapa puncak, Puncak Mandalika, puncak yang paling kecil, Puncak Gunung Lasem, Puncak Rahtawu dan beberapa puncak yang mengitari puncak utama (Oudraad, 1925). Puncak gunung Muria dapat dilalui lewat jalur Desa Tempur bagian utara dan jalur Desa Rahtawu melalui bagian Timur (*Catalogus der Lichtenbeelden-ver zameling van de Koninklijke Vereeniging Kolonial Institute*, 1924)

Pada masa sebelum abad XV, Muria merupakan nama pulau yang memisahkan dengan pulau Jawa (de Graaf dan Pigeaud, 1985: 38). Antara Pulau Muria dengan Pulau Jawa dipisahkan oleh selat yang bernama Selat Muria (de Graaf dan Pigeaud, 1985). Proses sedimentasi di Selat Muria yang pada puncaknya diperkirakan akhir abad XV telah menggabungkan antara Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Gunung ini memiliki jangkauan 3 wilayah, yaitu Jepara, Kudus dan Pati. Wilayah Utara gunung memiliki hubungan geologis dengan Gunung Ciliring (Clering) kemudian menyeberang laut ke arah Utara bersambung dengan Pulau Mandalika.

Keberadaan Gunung Muria telah membentuk gugusan pulau kecil di Laut Utara Jepara yang diperkirakan muncul pada tahun XXXIII SM. Gunung ini mengalirkan sungai-sungai Marong, Gong, Banjaran, Gelis, Jepara dan Tayu (Eysinga, 1850). Sumber air yang melimpah dengan keanekaragaman hayati menjadikan gunung ini sebagai daya tarik untuk dijadikan pusat aktivitas ekonomi, baik dengan sistem pembukaan lahan dengan perkebunan tebu sebagaimana terjadi pada abad XIX nanti, atau sekedar sebagai sumber ekonomi hutan produktif, terutama hutan jati. Sedimentasi Sungai Tuntang dan Delta Serang juga mempercepat fungsi lereng muria sebagai lahan perkebunan karena jalur perdagangan melalui dua sungai tersebut terganggu (Eysinga, 1850). Akibatnya, beberapa komoditas harus penuh, sehingga pemanfaatan lahan lereng Muria semakin intensif dengan pembukaan lahan baru bagi tanaman-tanaman produktif.

Sedimentasi Sungai Tuntang dan Delta Serang juga berpengaruh terhadap pengiriman komoditas ke Kudus dan Rembang. Pasokan hasil bumi dari Rembang dan Tuban mulai berkurang karena hanya kapal besar yang dapat berlabuh di pelabuhan utama Jepara. Sebelumnya, jalur-jalur selat yang menghubungkan Jepara, Demak, Kudus, Pati sampai Rembang dan Tuban dihubungkan oleh Selat Muria dengan perahu-perahu kecil. Kebanyakan perahu yang lewat selat adalah perahu Cina yang bernama *Jung* (Akhyat, 2020).

Tertutupnya jalur perdagangan lewat selat Muria dan minimnya transportasi darat yang masuk ke Jepara menjadikan Jepara semakin terpencil secara ekonomi. Jalur utama dari Kudus dengan menggunakan pedati melalui jalur dengan penuh debu, dan melalui jalur Pati, Tayu, Keling dan Jepara yang sangat berbahaya bagi pemakai jalur darat pada malam hari karena menembus hutan jati dan karet pada abad XIX, hanya menjadi jalur

alternatif, ketika jalur sungai tidak memungkinkan (Akhyat, 2022). Ketertutupan akses jalur akibat sedimentasi akibat banyaknya tanah longsor dan pengurangan debit air sungai pada periode akhir abad XIX dan awal abad XX, menempatkan Jepara kembali menjadi wilayah agraris dengan pola berkebun dan sebagian lahan sawah. Sebelumnya, pada masa Majapahit dan berlanjut Mataram, Jepara menjadi wilayah penghasil produk pertanian yang penting, terutama beras (de Graaf dan Pigeaud, 1985). Begitu juga jaringan laut sebelum pelabuhan pindah ke Semarang tahun 1770-an, Jepara masih menjadi bagian jaringan perdagangan laut dengan berbagai komoditas, rempah, hasil perkebunan maupun industri dari Maluku, Bali, Bangka dan bahkan sampai ke wilayah Zulu (Sutjipto, 1983).

Sedimentasi yang semakin parah, sehingga beberapa jalur kapal besar dari Eropa, Asia Selatan, dan bahkan Asia Timur yang menjadi pedagang-pedagang besar dengan memanfaatkan pelabuhan Jepara sebagai pelabuhan transit sebelum menuju Macao, Guangzhou, kepulauan Philippine dan bahkan sampai Nagasaki mulai terganggu, sehingga pelabuhan harus pindah ke Semarang (Akhyat, 2022). Jaringan perdagangan sebelumnya terbentuk dengan hadirnya kapal-kapal Eropa, terutama Perancis, Portugis dan Belanda serta kapal-kapal dari *haramain*, *hadramaut* dan Persia (Akhyat, 2022). Pindahannya pelabuhan Jepara ke Semarang, sebagian kapal-kapal besar masih berlabuh, namun pada perkembangannya, semakin didominasi untuk kapal-kapal dan perahu yang melayani transportasi antarwilayah secara domestik (Akhyat, 2022).

Perpindahan pelabuhan yang berpengaruh pada jumlah berlabuhnya kapal-kapal besar dan didominasi kapal-kapal antarwilayah dalam skala domestik, memberi angin segar bagi perusahaan perkebunan dan industri berbasis perkebunan dan kehutanan, terutama gula dan jati. (Peluso, 1991). Walaupun, proses perdagangan dari Jepara ke berbagai wilayah dan sebaliknya tidak lagi secara langsung, namun hal itu telah memberikan dorongan yang kuat berkembangnya perdagangan secara domestik.

Peningkatan pelayaran antarwilayah memberi dorongan peningkatan pembuatan kapal kecil dan sedang. Hal ini juga didorong dengan peningkatan lalu lintas barang yang diangkut terutama produk industri berbahan kayu jati. Industri kapal, *furniture* terutama ukir banyak membutuhkan bahan baku kayu jati, terutama pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Penebangan hutan jati semakin meluas sampai merambah ke wilayah lereng-lereng muria (Boomgaard, 2001). Hal itu pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan industri mebel dan kapal yang mulai merambah ekspor. Oleh karena itu, untuk menambah kekurangan bahan kayu jati didatangkan dari Rembang dan Blora.

Peningkatan penebangan hutan jati, baik untuk kepentingan industri mebel dan kapal, juga untuk pembukaan lahan baru perkebunan tebu, keberadaan hutan jati yang berada di lereng Muria yang mengarah ke Distrik Keling, untuk bagian Utara dan Distrik Mayong, untuk bagian Timur, mulai mengalami persoalan. Penggundulan lereng muria yang mengarah ke Distrik Keling pada tahun 1860-an mulai diadakan reboisasi (*Statistiek der Residentie Japara, 1961*). Wilayah ini banyak diusahakan perkebunan kopi dan sebagian indigo yang selama periode kolonial tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Upaya reboisasi oleh pemerintah kolonial dimaksudkan sebagai upaya untuk mengganti hutan jati dengan tanaman produktif, terutama kopi, indigo, dan lamtoro.

Sementara penggundulan lereng yang menuju Distrik Mayong dan Kudus, mengalami proses terbukanya lahan-lahan tanpa ada tanaman pelindung atau *oro-oro*, yang cukup luas (*Statistiek der Residentie Japara*, 1861). Terbukanya lahan wilayah Timur lereng Muria ini kemudian dijadikan lahan baru untuk tanaman tebu. Distrik Mayong, Pancur, sampai wilayah Bahe menjadi perkebunan tebu yang sangat penting pada awal abad XX.

Posisi lahan di kawasan lereng dengan kemiringan tidak terlalu tajam, dengan pola pengusahaan lahan bersistem terasering yang kemudian tidak hanya perkebunan tebu tetapi juga sawah dan sayuran menjadi salah satu batasan awal yang penting dilakukan analisis lingkungan. Persawahan dan tanaman sayuran tentu saja memiliki daya tahan lahan yang jauh berbeda dengan tebu. Pola kebun dan sawah yang demikian berpotensi mendapatkan tekanan dari atas, sehingga kemungkinan menjadi sebab longsor sangat kuat. Begitu pula banjir yang pernah terjadi di sisi lereng Utara menuju wilayah Distrik Kembang menjadi kasus yang penting untuk menelusuri kerusakan lingkungan. Bahkan kebencanaan tersebut dapat ditelusuri sampai masa kontemporer (Annisa, Setyowati, 2019).

Disamping itu, permintaan kayu jati yang meningkat akibat peningkatan permintaan hasil kerajinan dan industri kayu jati, yang berupa kapal, mebel kebutuhan rumah tangga pada masa VOC (*Vereeniging Oost Indie Compagne*) menjadi daya dorong penebangan pohon jati meningkat (Lombart, 1996: 95). Kerajinan seni ukir, serta berkembangnya batik Jepara pada awal abad XX, memberikan dorongan kuat beralihnya petani menjadi pengukir dan pembatik pada akhir abad XIX (Gustami, 2000). Permintaan dan pengusahaan jati Jepara oleh VOC tidak tergantikan oleh daerah lain pada mula awalnya. Kayu “jati”, menurut Lombart, walaupun ia masih menyangsikan, memiliki arti “kayu yang sebenarnya”, merupakan kayu yang dianggap paling baik dan tidak ada duanya (Lombart, 1996). Sejak VOC mendirikan loji pertama kali di Jepara, permintaan kayu jati tidak pernah berhenti. Selama dua abad berikutnya, penebangan pohon jati akibat pesanan (*houtleveranties*) yang semakin meluas selaras dengan perkembangan munculnya industri kapal sepanjang abad XVII-XIX (Lombart, 1996).

Lahan-lahan pohon jati yang semakin menyempit dan berakibat semakin luasnya wilayah yang belum munculnya reboisasi alami dengan tunas jati yang teratur, maka sering menjadi persoalan lingkungan yang tidak pernah menjadi perhatian kolonial. Tidak lama menjelang abad XIX, proses kerusakan lereng Muria semakin parah, tidak hanya akibat pesanan kayu yang meningkat, namun juga akibat pembukaan lahan tebu terutama di Daerah Distrik Mayong.

Perluasan pembukaan lahan tebu yang tidak hanya berada di wilayah Dusun Bae, tetapi sudah mulai naik dan mendekati wilayah lereng-lereng. Pembukaan lahan tebu ini kemudian tidak hanya menjadikan terbukanya lahan-lahan yang sebelumnya menjadi wilayah perkebunan dan pekarangan, namun juga komunitas lereng mengalami perubahan orientasi aktivitas ekonomi (Boomgaard, 2001). Pergerakan pekebun yang sebelumnya tergantung pada kebun dan tanaman pekarangan serta sesekali mengambil keuntungan tanaman konservasi, pohon jati, mulai bergerak menjadi petani-petani tebu

(Kian, 2006). Walaupun, tebu sudah ditanam secara teratur dan bersistem perkebunan sejak masa VOC dengan perjanjian pengusahaan lahan untuk tanaman tebu antara VOC dengan Sunan Amangkurat II yang disaksikan oleh Bupati Jepara, Ngabehi Wangsadipa (Kian, 2006).

Pergerakan komunitas pekebun menjadi petani dan buruh tebu menjadi gejala perubahan social penting, karena hal ini persoalan yang lebih serius mulai terjadi. Hal yang paling serius akibat dari pergerakan pekebun itu adalah mulai terjadinya pembiaran tanaman lereng, baik tanaman kopi yang sebelumnya menjadi sumber ekonomi utama, maupun tanaman pekarangan dan konservasi. Permintaan gula yang cukup besar yang melibatkan pengusaha Cina dari Pati dan Semarang, satu sisi meningkatkan produktivitas gula dan meningkatkan luasan lahan tebu, namun di sisi, ancaman kebencanaan, banjir dan kekeringan, akibat tidak adanya pelindung lahan semakin sering terjadi (Akhyat, 2022).

Di samping itu, meningkatnya industri berbahan kayu jati terutama industri mebel, ukir, dan batik sejak tahun 1880-an, menjadi peluang baru bagi petani kopi, khususnya yang berada Desa Tempur. Namun demikian, pola konversi profesi tersebut telah menyumbang proses perluasan lahan-lahan kosong, *oro-oro*, yang merupakan lahan “mati” karena tidak ditanami dan dibiarkan oleh petani. Rusaknya hutan Muria akibat perluasan perkebunan tebu, pembiaran dengan menjadikannya tanah “mati”, *oro-oro*, tidak hanya memberikan dampak pada rusaknya lingkungan, tetapi juga habitat yang menjadi penghuni hutan Muria (Boomgaard, 2001).

Kasus-kasus terbunuhnya para petani tebu oleh hewan buas, terutama harimau, di perkebunan tebu Jepara memberikan penjelasan penting, telah terjadi persoalan lingkungan dan rusaknya pemukiman habitat di dalamnya. Serbuan harimau di perkebunan tebu di Jepara cukup tinggi memakan korban. Begitu juga kerusakan lingkungan telah menyebabkan tanah longsor di lereng Muria selama abad XIX dan awal abad XX yang banyak menelan korban. (Boomgaard, 2001). Di samping itu, pada akhir abad XIX, Jepara pernah mengalami kekeringan dan badai yang dahsyat, sehingga banyak penduduk yang “mengungsi” ke Pati dan Semarang (Akhyat, 2022). Hal ini juga diperparah kasus-kasus tanah longsor, banjir yang seolah menjadi bagian dari proses social ekonomi komunitas lereng Muria yang tidak pernah berhenti.

Proses pembukaan lahan tebu tanpa mempertimbangkan ekologi lereng Muria serta eksploitasi tanaman jati sebagai konsekuensi meningkatnya kebutuhan bahan baku industri kapal maupun peralatan rumah tangga, terutama ukir, menjadi peluang sumber ekonomi komunitas perdesaan Jepara. Persoalan ancaman kebencanaan yang dapat selalu muncul bagi desa-desa di lereng Muria tidak menjadi ancaman secara ekonomi bagi komunitas desa. Hal ini karena sumber ekonomi pokok lebih diperoleh dari aktivitas ekonomi di pusat industri. Kasus komunitas Desa Tempur yang lebih banyak bergerak di pusat-pusat industri mebel dan batik menjadikan rusaknya wilayah permukiman di lereng Muria tidak banyak berpengaruh bagi kehidupan social-ekonomi perdesaan.

Pada awal abad XX, pergerakan petani yang mengalami perpindahan pekerjaan menjadi buruh industri menjadi gejala umum di Jawa ketika industrialisasi tumbuh

(Boomgaard, 2001; Akhyat, 2020). Jepara mengalami hal serupa, banyak petani dan pekebun di lereng Muria melakukan pekerjaan ganda, petani dan buruh industri, namun perubahan terjadi pada saat permintaan tenaga kerja di industri mebel dan perajin kapal (Akhyat, 2021). Desa-desanya pusat kerajinan ukir sebagaimana Desa Mulyoharjo, Desa Senenan, Desa Blimbingharjo, Desa Bulungan merupakan desa-desa perintis desa “ukir” yang menjadi rujukan para petani melakukan perpindahan pekerjaan dari petani menjadi pengrajin ukir (Muhajirin, 2018).

Pola kebijakan lingkungan, pelibatan dan reaksi penduduk tempatan yang menjadi “penghuni” tidak pernah menjadi bahan analisis bagaimana kolonialisme melakukan eksplorasi sumber alam serta kebijakan-kebijakan yang diambil selama proses eksplorasi. Implikasi social,serta perubahan ekologi yang memiliki efek kebencanaan tampaknya perlu mendapatkan perhatian untuk tidak hanya mengungkap kebijakan kolonial dalam penanganan lingkungan, namun proses-proses eksploitasi lereng Muria yang terjadi dan berimplikasi pada lingkungan dan social tempatan.

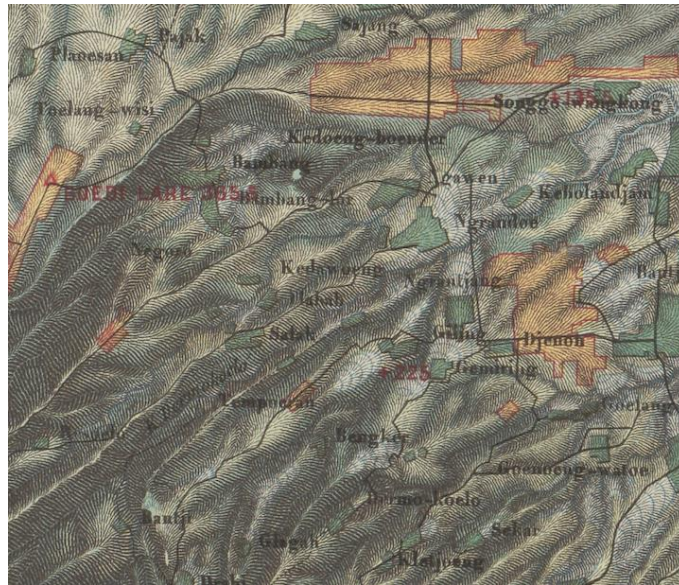
Satu Desa, Dua Ekologi: Desa Tempur dalam Manajemen Lingkungan yang Tumpang Tindih

Desa Tempur merupakan salah satu desa yang terletak di lereng Gunung Muria bagian utara yang merupakan bagian dari Distrik Banjaran, Jepara. Desa ini pada masa kolonial tidak banyak penghuni, karena sebagian lahan yang ada di desa memiliki kemiringan yang cukup curam. Oleh karena itu, hanya beberapa lahan berpenghuni di sela-sela pohon jati rakyat dan kopi. Bahkan tidak sedikit lahan yang masih berupa lahan kosong dan semak belukar akibat di *babadi* (digunduli) (Oudraad, 1925:41). Hal ini karena, hutan jati dan kopi, masih diusahakan oleh komunitas yang bertempat tinggal di lereng-lereng gunung.

Masyarakat yang tersebar dengan pola kehidupan ekonomi yang didasarkan hasil hutan, perkebunan dan pekarangan menjadikan komunitas Tempur banyak yang mengakses ekonomi ke daerah bawah. Desa Tempur ini merupakan desa yang berada di tepi sungai Darmokerto di bagian Barat, dibatasi dengan Desa-Desa Salak, Kedawung, Gemiring di bagian Utara, Desa-Desa Bengker, Gunungwatu di sebelah Timur, dan Desa-Desa Banci, Glagah, Klecong serta Darmokulo (n) bagian Selatan. Jika dilihat dari peta di bawah, maka Tempur memiliki wilayah yang gundul (area berwarna kuning), tanpa lahan persawahan (area berwarna hijau) dan hanya pekarangan, lahan tanaman jati dan kopi (garis-garis). Jika dilihat dari peta tersebut, di bagian bawah justru semakin banyak lahan gundul dan sebagian darinya sudah diusahakan sebagai lahan produktif, baik sawah lahan kering maupun perkebunan.

Ketergantungan komunitas terhadap sumber ekonomi jati dan kopi tidak dapat tergantikan sampai hadirnya pembukaan lahan-lahan tebu yang banyak dibuka di daerah Mayong, Pecangaan. Pembukaan lahan tebu memang tidak dapat dilakukan di wilayah Utara yang merupakan letak Desa Tempur. Hal ini dikarenakan kemiringan lahan yang

tidak aman bagi perkebunan tebu. Oleh karena itu, masyarakat lebih banyak tergantung pada tanaman jati dan kopi.



Sumber: *Topographische kaart der residentie Japara*, sheet 3 (digital collections.universiteitleiden.nl)

Sampai tahun 1800, kondisi pohon jati dan kopi semakin parah akibat pemanfaatan jati dan kopi sebagai sumber pendapatan utama. Akibat pemanfaatan jati dan kopi dengan tanpa pengaturan yang jelas, banyak ditemukan kerusakan parah pada hutan jati dan kopi di sebagian besar wilayah Tempur khususnya dan lereng Muria pada umumnya (Braam, 1935: 15). Kerusakan hutan jati dan kopi semakin parah menjelang tahun 1800, bahkan dilaporkan beberapa wilayah jati, tidak hanya Jepara, tetapi juga Rembang, Lasem, Tuban juga mengalami hal yang sama (Braam, 1935:15). Pada tahun 1801 berdasarkan keputusan Komisi Pendirian 1801 (*Commissie van Opneming*, 1801), semua hutan jati di Jawa ditutup dan tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon jati selama 25 tahun (Braam, 1935: 15). Jangka waktu itu, dapat diperpanjang jika terjadi penebangan dan perusakan sebelum jatuh tempo 25 tahun (Braam, 1935:15).

Oleh karena itu, perawatan hutan jati tidak lagi berada di bawah perusahaan atau individu, akan tetapi langsung di bawah *Javasche Djatibosch*. Peraturan itu berlanjut tahun 1803 dan diperketat pada masa Deandels 1808 dan berlanjut pada masa Hindia Belanda, 1830, 1836 dan 1854 (Braam, 1935: 15). Peraturan itu untuk tingkat lokal tidak berjalan dengan baik, karena ada ketimpangan pengelolaan antara pemerintah kabupaten dengan *Javasche Djatibosch*. Sebuah laporan menunjukkan, bahwa sampai tahun 1865 penebangan semakin banyak terjadi, karena pohon jati di Desa Tempur bukan merupakan bagian dari hutan negara. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan rakyat di Tempur tidak terjangkau oleh peraturan *Javasche Djatibosch*. Kecuali itu, pemerintah lokal Jepara, baru mengalami peningkatan industri mebel semenjak *Cultuur-stelsel* dan berlanjut saat Kartini membuka pasar ke Eropa, khususnya Belanda pada awal abad XX (Akhyat, 2022)

Penebangan hutan jati, terutama di wilayah Jepara, Rembang, Lasem dan Tuban lebih banyak akibat peningkatan permintaan produk mebel, disamping teknik dan cara penebangan yang justru merusak pohon jati dan kopi yang masih kecil (Eyken, 1909:35). Alat pemotong kayu yang sangat besar dan berat dengan harga sekitar f. 30.000, harus ditarik 60 kerbau untuk dapat masuk ke hutan jati yang memiliki kontur lahan yang memungkinkan mesin pemotong masuk (Eyken, 1909: 36). Untuk tanaman jati yang berada di dataran tinggi sebagaimana di Tempur, penebangan dilakukan dengan cara manual. Hal ini yang kemudian banyak berdampak pada rusaknya pohon dan tanaman lain yang terkena dampak penebangan.

Peningkatan industri mebel, bukan satu-satunya yang mengakibatkan hilangnya hutan jati, khususnya di Jepara. Pada tahun 1880-an, dilakukan secara besar-besaran eksploitasi kayu jati dengan pengiriman khusus ke Eropa rata-rata 30.000m³/ tahun. Banyak wilayah termasuk di Jepara yang banyak tumbuh pohon jati di lereng Muria bagian Utara dan Timur, ikut terkena dampaknya. Walaupun khusus wilayah Jepara sudah dilakukan reboisasi jati, namun karena tidak ada perawatan dan usaha-usaha manajemen yang baik, maka penebangan jati terus berlangsung.

Pada tahun 1880, penentangan penebangan jati khususnya yang terletak di lereng pegunungan mulai mendapat respon. Penentangan terhadap penebangan terutama yang merupakan hutan jati milik negara (*Djatiboschewezen*) berlanjut dengan pelarangan penebangan seluruh pohon jati milik perusahaan negara. Pelarangan tersebut kemudian diperkuat dengan hasil investigasi Komisi Eksploitasi yang melaporkan bahwa reboisasi hutan jati, khususnya di Rembang, Jepara dan Lasem gagal (Eyken, 1909: 35).

Laporan Komisi yang menentang eksploitasi jati secara besar-besaran yang terbit tahun 1885, kemudian menjadi dasar penerbitan peraturan terkait Aturan Pengelolaan Hutan (*Boschreglement*) yang tertuang dalam *Staatblad* 1905, no. 40, art. 10, Alinea 6. Peraturan itu kemudian secara khusus menyebut pelarangan penebangan pohon jati, kecuali pohon yang sudah kering dan yang merupakan hutan rakyat (Eyken, 1909:35).

Peraturan yang muncul dengan membolehkan penebangan pohon jati yang merupakan milik rakyat, maka penebangan terus berlanjut dan bahkan untuk Desa Tempur dan Rahtawu serta wilayah bawah yaitu Dawarwulan, mengalami persoalan lingkungan yang cukup parah.

Di Tempur sendiri, penggundulan hutan jati tidak banyak menimbulkan persoalan lingkungan, namun efek penggundulan dengan penarikan kayu hasil tebangan secara manual telah merusak sebagian besar wilayah konservasi di Tempur, Damarwulan dan Rahtawu. Bahkan untuk wilayah penimbunan hasil penebangan banyak mengalami penggundulan. Memperhatikan peta di atas tersebut, di daerah Songgowangkong dan Djenoh, menjadi tempat penimbunan batang pohon sebelum diangkut ke Banjaran dan atau pelabuhan.

Tidak efektifnya peraturan terkait penebangan pohon jati, maka pada tahun 1865 digunakan sistem *Blandong* (*blandongdiensten*) sebagai cara pengelolaan hutan rakyat berdasar manajemen lokal (Braam, 1935: 15). Sistem *blandong*, tidak banyak memberikan pengaruh ekonomi pada komunitas Desa Tempur, karena pengelolaan hutan

banyak diserahkan kepada kepala “ahli hutan” yang lebih dipraktikkan sebagai model kerja paksa. Oleh karena itu, sistem *blandong* ini justru banyak menggunakan tenaga komunitas sekitar hutan dengan pola sebagian menjadi tenaga kerja bebas, tetapi sebagian yang menjadi tenaga kerja kontrak. Hal yang menarik dari Desa Tempur adalah hutan konservasi yang merupakan hutan rakyat, justru berbalik menjadi hutan produksi, sehingga eksploitasi terus terjadi yang terjadi berakibat rusaknya lahan terdampak.

Tenaga kerja bebas, lebih banyak terserap dalam kerjaan membersihkan cabang-cabang dari pohon jati dan membersihkan sisa-sisa hasil penebangan. Sementara tenaga kerja kontrak lebih banyak memenuhi pekerjaan pemotongan dan pengiriman kayu. Namun, selama kurun waktu 1880-an, dua jenis pekerjaan itu sangat sulit dibedakan, khususnya ketika komunitas Desa Tempur mengalami kebencanaan. Hal ini karena, sirkulasi antara waktu tanam dan tebang tidak sesuai perhitungan, sehingga pohon yang siap tebang habis sebelum pohon cadangan siap ditebang (Braam, 1935). Akibat yang parah, adalah munculnya tanah-tanah kosong, *oro-oro* yang cukup luas dan dinyalir merupakan titik rawan munculnya tanah longsor (*Naturlijke Reboisatie*, 1902)

Kegagalan hutan jati sebagai sumber ekonomi komunitas lereng Muria, khususnya di Desa Tempur yang kemudian berakibat kerusakan lingkungan yang parah, oleh kelompok missionaris dilakukan upaya menghidupkan kembali ekonomi kopi. Kelompok missionaris ini tidak langsung menempati Desa Tempur, namun mereka membuka desa baru dengan membuka hutan yang bernama Desa Bondo dan Cumbring yang cukup jauh dari Tempur (Wolterbeek, 1995:53-58). Di samping desa-desa itu, juga ada beberapa desa yang ikut menjadi desa Kristen yaitu Banyutowo dan Tegalombo, Kedung Penjalin dan Kayuapu. Pendirian jama’at Kristen ini, bukan hanya sebagai komunitas baru jama’at Injil di Jepara yang berada di desa-desa sekitar hutan dan bahkan dengan membuka hutan, namun juga sekaligus akan menjadi tenaga kerja, terutama perkebunan kopi.

Salah satu desa yang menjadi pemasok tenaga kerja kopi adalah Desa Bondo. Desa Bondo terletak di Distrik Keling yang berada di bawah lereng Muria bagian Utara. Desa ini merupakan desa yang penduduknya sebagian besar didatangkan dari luar desa. Salah satunya dari Karesidenan Semarang yang mengalami kelaparan (Elson, 1997 ; Suryo, 1989). Sementara desa-desa yang lain belum ditemukan informasinya, akan tetapi untuk desa-desa Kristen banyak penduduknya didatangkan dari luar desa. Tidak banyak arsip maupun laporan-laporan yang rinci mengenai penduduk yang menjadi penghuni “desa-desa” baru. Namun, beberapa yang merupakan pengikut Hoesoo, seorang pendeta yang datang ke Bondo menceritakan bahwa orang-orang yang didatangkan ke Bondo, sebagian diarahkan untuk mengelola kopi di Desa Tempur

Kopi yang merupakan tanaman rakyat di Tempur, sebenarnya tumbuh sebagai tanaman tumpang sari dengan pohon jati. Namun, beberapa kasus juga menjadi tanaman di pekarangan penduduk. Kehadiran tanaman kopi ini menurut cerita lisan yang berkembang muncul jauh sebelum masa kolonial. Namun, karena persoalan harga kopi yang tidak sebanding dengan tenaga yang harus dikeluarkan, maka memunculkan masalah, yaitu banyak penduduk yang meninggalkan tanaman kopi mereka.

Kopi kemudian menjadi tanaman liar yang hanya dipanen pada saat tanaman jati tidak memberikan hasil karena masih proses menunggu waktu tebang. Komunitas Tempur, di samping kehidupan ekonomi ditopang dari hasil hutan jati, juga perkebunan termasuk kopi dan indigo (Akhyat, 2021). Karena menguntungkan maka pada tahun 1863, lahan kopi yang berada di daerah rawan bencana atau bukan, pengelolaannya menjadi di bawah pemerintah (*Gouvernement koffij cultuur*) (Kolonial Studien, 1867). Untuk memperkuat kesinambungan keuntungan tersebut, maka pemerintah perlu membentuk kesatuan pengelolaan yang diberikan kepada kepala daerah sampai kepala desa. Dengan demikian, kopi dalam pengelolaan yang ditanggungjawabkan kepada kepala desa akan memberikan keuntungan dan pengawasan, sehingga panen dapat diharapkan mencapai target mencapai 2000 pikul per tahun (Kolonial Studien, 1867).

Pola manajemen yang diserahkan kepada kepala desa, justru kurang efektif. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kebocoran dan sistem pengawasan. Sebuah kasus yang menarik ketika kopi di Jepara tidak memberikan hasil panen maksimal bagi pemerintah, yaitu ditemukannya penimbunan kopi di gedung seorang Cina yang bertempat tinggal di Pati yang bernama Tan Hogoan.

Tan Hogoan ini membeli kopi ke penduduk, khususnya dari Tempur melalui penyalur kepala desa. Ketika dibongkar gudang kopi Tan Hogoan, ditemukan lebih dari 1.600 pikul yang ditimbun di Gudang. Protes Tan Hogoan kemudian dilayangkan ke Pemerintah, bahwa apa yang dia lakukan sudah seijin dan melalui kepala desa (*Kolonial Studien*, 1867).

Kurang efektifnya pengelolaan kopi di Jepara yang luasan wilayah kebun kopi mencapai 89.000 bahu dengan total panen 11.809 pikul per tahun. Sementara kopi rakyat yang khususnya berada di lereng gunung Muria hanya sekitar 7,037 bahu dengan total panen 176 pikul per tahun (*Kolonial Studien*, 1867: 105).

Untuk kopi yang di bawah pengelolaan pemerintah, penghitungan upah dan jumlah hari kerja sangat jelas. Untuk tanaman kopi dengan jumlah 500 pohon, dibutuhkan waktu 60 hari untuk mengurus sampai panen. Jumlah tenaga kerja tidak tetap, sehingga di dalam penghitungan statistic tidak dimasukkan. Namun, rata-rata setiap panen, pemerintah mengeluarkan upah sebesar 85 sen per hari. Di dalam hitungan per panen, maka kira-kira setiap keluarga memperoleh 24, 15 gulden (Kolonial Studien, 1867:107).

Sementara untuk perkebunan kopi rakyat yang banyak tumbuh di lereng Gunung Muria, terutama di Desa Tempur, hanya kira-kira memperoleh 31 sen per hari. Itu pun jika hasil panen tidak mengalami kerusakan akibat penebangan kayu jati yang sering mengenai pohon kopi.

Ketimpangan hasil panen kopi ini, maka banyak tenaga kerja yang bergerak ke kopi pemerintah terutama di wilayah Banaran, Semarang dan sebagian di Jepara sendiri. Walaupun upah pemetik kopi di Banaran, Semarang lebih rendah daripada di Jepara, yaitu hanya 29,40 gulden.

Para pemetik kopi yang dikelola pemerintah memiliki kesempatan memperoleh pendapatan lebih jika dibandingkan dengan pemilik kopi rakyat. Di bawah ini

penghitungan pendapatan upah pemetik kopi di bawah pemerintah dari beberapa daerah penghasil kopi.

Tabel 1. Pendapatan Rata-Rata Pemetik Kopi Berdasar Luasan, Jumlah Tanaman, Upah dan Kebutuhan Tahun 1863

Karesidenan	Jumlah Tanaman	Jumlah hari kerja	Upah per hari (sen)	Kebutuhan ekonomi keluarga	sis	kurang
Cirebon	1000	120	42	21	21	-
Tegal	690	88	29,05	62	-	32,45
Pekalongan	690	88	29,05	34,50	-	5,45
Semarang	700	84	29,40	25,50	3,90	-
Jepara	570	69	24,15	19	5,15	-

Sumber: Koloniale Studien, *Gouvernement Koffij Cultuur Op Java*, 'S-Gravenhage:van Weeleden & Mingelen, 1867, hlm. 105-112.

Memperhatikan pendapatan pemetik kopi yang dikelola oleh pemerintah, maka pemetik kopi ini tidak lagi menjadi persoalan terkait kebutuhan keluarga. Jika dibandingkan dengan kopi rakyat, sangat jauh selisih yang diperoleh petani kopi rakyat. Upah atau pendapatan petani kopi rakyat hanya 31 sen per hari. Namun, karena kebutuhan keseharian kurang dari 20 sen per hari, maka sebenarnya petani kopi rakyat yang berada di Desa Tempur khususnya dapat bertahan. Apalagi pendapatan mereka tidak hanya dari hasil panen kopi, akan tetapi dari jati dan indigo (Akhyat, 2021).

Memperhatikan ekonomi jati dan kopi di Desa Tempur, bukan persoalan ekonomi yang menjadi determinan. Secara ekonomi, jati dan kopi memberikan penghasilan pada komunitas Desa Tempur, terutama yang memiliki lahan sebagai lahan kopi dan jati. Tidak mudah menghitung ekonomi jati di Desa Tempur, dikarenakan sistem pengelolaan jati rakyat di Desa Tempur lebih diserahkan pada penebang, sedangkan tenaga kerja diambil dari komunitas desa, sistem ini sering disebut sebagai pola *blandong*. Ketika kebutuhan kayu meningkat tenaga kerja penebang pohon, tidak hanya diambil dari desa, namun seringkali juga melibatkan pemilik pohon jati dan atau komunitas di sekitar hutan, bahkan luar desa. Hal ini yang hampir mirip dengan pengelolaan kopi yang dikelola oleh keluarga yang merupakan komunitas desa dan tidak jarang mengambil tenaga kerja dari luar desa.

Hubungan komunitas desa dengan sumber ekonomi jati maupun kopi tidak selamanya menjadi hubungan integral struktur ekonomi desa. Jati dan kopi hanya menjadi bagian penopang ekonomi ketika ketersediaan sumber ekonomi di luar jati dan kopi berkurang. Permintaan tenaga kerja untuk kopi dan jati meningkat saat kebutuhan industri mebel meningkat, sehingga kebutuhan tenaga tebang, angkut dan penggergajian meningkat. Sementara itu, untuk kebutuhan pemetik kopi, lebih banyak diambil dari luar desa. Pengangkutan dari lereng gunung sampai ke jalan lebih banyak menggunakan tenaga manusia maupun kerbau. Hal ini karena di Jepara tidak dilalui jalur kereta api besar (*spoorwegen*), tetapi hanya kereta api kecil (*Staatspoorweg*) yang menghubungkan

Jepara, Demak, Semarang; Jepara, Demak, Kudus, Pati, Tayu dan Rembang (Gelden en Lekkerkerker, 1928:14).

Jumlah penduduk yang melimpah untuk seluruh Jepara, dengan total Bumiputra 413,540 pada tahun 1847, menjadikan tenaga kerja untuk kebutuhan penebangan jati maupun pemetik kopi tidak menjadi masalah, walaupun dengan pola *srabutan*, tenaga kerja bebas (Crawford en Sykes, 1949).

Persoalan muncul ketika, penebangan jati di lereng Muria mulai berakibat adanya tanah longsor. Tidak hanya tanah longsor yang menjadi persoalan akibat penebangan jati, namun juga rusaknya habitat fauna dan flora. Kopi dalam skala tertentu, masih bertahan dengan beberapa kawasan rusak akibat dijadikan jalur batang kayu jati setelah dipotong menjadi rata-rata 3-5 m.

Rusaknya habitat flora sangat berdampak pada hilang dan keluarnya fauna dari hutan. Desa Tempur yang terletak di bagian utara lereng semakin tampak parah dengan hancurnya situs-situs arkeologis. Secara kultural, di Tempur pada tahun 1880-an, tidak banyak ditemukan artefak maupun situs-situs terkait penyebaran agama. Hanya dua patung perempuan terbuat dari batu dengan tinggi 0,5 kaki. Patung itu menggunakan gelang di lengan atas dan hiasan di dahi (*Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, deel XXXIII, 1868). Dugaan kuat karena hancurnya tempat-tempat situs akibat penebangan pohon jati. Namun, sisi lain juga disimpulkan adanya kemungkinan Hindu tidak banyak pengaruhnya di Tempur karena merupakan daerah rawan yang tidak dapat dijadikan sebagai wilayah penempatan situs keagamaan yang aman.

Reboisasi dan Perlindungan Hutan

Surat Residen Jepara tanggal 27 Desember 1894, meminta lereng Muria segera direboisasi dengan model “pagar hidup”. Surat itu ditujukan kepada Direktur Administrasi Dalam Negeri (*Directeur van Binnelandsch Bestuur*) yang intinya meminta dana untuk kegiatan reboisasi (*Naturlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte*, 1902). Upaya untuk melakukan reboisasi di lereng Muria tersebut sebagai bentuk pengembalian lingkungan sekitar lereng dan juga sebagai upaya untuk menghindari kebencanaan lebih parah.

Kegiatan reboisasi yang diusulkan Residen Jepara itu kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Gubernemen tanggal 21 Oktober 1895, no. 20 dimana pemegang otoritas Gunung Muria menyediakan dana 7.500 gulden dan ditambah lagi 2.500 gulden. Dana tersebut digunakan sebagai pembangunan pagar dan beberapa tanaman sebagai pelindung lahan pertanian (*Naturlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte*, 1902).

Penerapan peraturan pagar ini juga dilanjutkan dengan memberlakukan peraturan tanggal 27 Februari 1891 yang dikeluarkan oleh Bupati bahwa,

1. Pelarangan memasuki batas pagar sebagai cara membatasi masuknya orang-orang ke “hutan lindung” di lereng Muria

2. Semua penduduk hanya dibolehkan tinggal sekitar 100 meter dari pagar dengan tidak dibolehkan menyalakan api, membawa zat berbahaya yang mudah terbakar, membawa penerang dari api (obor) saat jalan, dilarang membawa kapak atau alat penebang besar, menggembalakan ternak di kawasan “hutan lindung”.

Pagar itu kemudian diperluas sampai ke wilayah lereng yang berbatasan dengan Kudus dan Pati melewati perkebunan kina “batumgoeny” sampai Gunung Mergojambangan yang ketinggiannya mencapai 1000 dpl dan berbatasan dengan wilayah persawahan Jolong (*Naturlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte*, 1902: 2).

Reboisasi dengan membuat pagar hidup sebagai batas larangan penebangan dilakukan di daerah-daerah sepanjang sungai dan jurang yang diperkirakan memiliki potensi kebencanaan. Pagar hidup ini juga tidak seluruhnya bersambung, kadang terputus karena daerah yang terlalu curam dan bertebing. Untuk wilayah bukit, dengan ketinggian maksimal 700 meter dpl, upaya penanaman kembali pohon konservasi dilakukan. Jenis tanaman yang menjadi pagar hidup dan dapat menjadi pelindung lahan adalah tanaman andung (*Culodracon Jacquinii*), tanaman kuda-kuda (*odima gummifera*) dan beberapa jenis tanaman *agave* lain.

Hampir di seluruh wilayah lereng Muria dilakukan reboisasi dengan berbagai tanaman untuk konservasi seperti sengon, tanaman produksi seperti buah-buahan, serta alang-alang yang merupakan wilayah yang agak landai dan ada perumahan penduduk. Hutan di lereng sebagian masih ada yang terselamatkan, walaupun sisi timur dan sebagian utara memang sudah mulai rusak (Boomgaard, 2006). Sebagian tanaman yang dibawah pohon rindang, banyak yang mati karena kurang sinar matahari, begitu juga alang-alang dan semak-semak yang hidup di sela-sela hutan akan mendapatkan perawatan yang serius. Rata-rata luas daerah alang-alang, 25 m² dan terdiri dari beberapa blok alang-alang (*Naturlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte*, 1902: 5).

Lereng puncak Rahtawu yang mengarah ke Sungai Gelis menjadi wilayah yang banyak bencana longsor. Di Lereng Muria bagian puncak Rahtawu ini banyak lahan-lahan hasil reklamasi akibat longsor. Sebagian wilayah ini berupa tebing yang sangat curam, berbatu dan berupa tanah tebing batu yang tegak lurus. Di sini ada Puncak Gundil yang searah dengan Desa Rahtawu dan Desa Tempur. Walaupun Desa Tempur posisinya lebih tinggi. Puncak Rahtawu, Gundil dan Desa Tempur sebenarnya merupakan wilayah yang banyak tanaman kopi (*Naturlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte*, 1902: 5). Namun, karena rusak dan ancaman longsor serta kekeringan, maka banyak yang ditinggalkan petani sebagaimana di Desa Colo dan Japan. Di Tempur, kopi berfungsi sebagai tanaman produksi sekaligus konservasi. Namun, tumbuhnya industri mebel, kasus di Desa Tempur tidak lebih baik dari Desa Colo dan Japan.

KESIMPULAN

Kajian sejarah lingkungan pada wilayah lereng pegunungan sebagaimana di Desa Tempur, Distrik Keling, Jepara memberikan catatan penting dalam historiografi Indonesia. Perubahan-perubahan wilayah lereng pegunungan, dalam hal ini kasus Jepara,

telah menciptakan determinan baru dalam menjelaskan perubahan social ekonomi, yaitu perubahan lingkungan. Boomgaard maupun Cribb lebih menyimpulkan faktor manusia yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Dengan pendekatan konvensional, memiliki kemiripan kasus apa yang terjadi di Desa Tempur dengan pola ekologi yang ganda, jati dan kopi. Akan tetapi faktor alam termasuk kontur lahan tidak pernah menjadi cara melihat perubahan lingkungan di wilayah lereng pegunungan.

Kasus Desa Tempur dalam periode 1880-an sampai 1930-an, menunjukkan relasi antara perubahan social dengan lingkungan secara langsung. Keunikan proses dan pola adaptasi komunitas desa menjadi hal penting dalam persoalan sejarah lingkungan. Perubahan lingkungan dengan beragam bencana, memberikan dorongan kuat untuk menemukan sumber ekonomi baru, yaitu industri. Pola adaptif akibat perubahan lingkungan tentu saja, bukan hal yang biasa dalam komunitas perdesaan. Komunitas Desa Tempur selama kurun waktu 1880-an sampai masa krisis 1930-an telah memberikan pemahaman baru, bagaimana kemampuan adaptif bagi komunitas di wilayah riskan bencana muncul. Strategi adaptif sebagai komunitas yang berada di bawah bayang-bayang bencana menunjukkan gagalnya pandangan sejarah terkait mitos petani malas, menjadi objek dan korban dalam kajian sejarah Indonesia-sentris.

DAFTAR PUSTAKA

Penerbitan Khusus

“Cataloges der Lichtenbeelden ver zameling van de Koninklijke Vereeniging Kolonial Institute, Java en Madoera, Oudschappen”, 1924, groep I-II, Supplement 1929: Amsterdam.

Kolonial Studien, 1867, “de Gouvernements Koffij Cultuur op Java”, ‘S-Gravenhage: van Veldeën & Mingelen.

Naturlijke Reboisatie op Het Moeriagebertgte, 1902

Statistiek der Residentie Japara, 1861

Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1868, deel XXXIII

Disertasi, Buku

Arif Akhyat dan Tim, 2021, “Konglomerasi dan Kontestasi: Merekonstruksi Jalur Rempah dan Implikasinya di Pantai Utara Jawa”, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Kebijakan, Kemdikbud, Republik Indonesia, Jakarta.

Arif Akhyat, 2022, *Kosmopolis Rempah Jepara: Rempah dan Hibridisasi di Pantai Utara Jawa Tengah*, Badan Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta.

Boomgaard, Peter, 2001, *Frontiers of Fear, Tiger and People in The Malay World, 1600-1950*, New Heaven & London.

- Crawfurd, John, & Sykes, W.H., 1847, "Vital Statistics of a district in Java", *Journal of Statistical Society of London*, vol. 12 (1), hlm. 60-71.
- Djoko Suryo, 1989, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta: Pusat Antar Studi Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada.
- Elson, R.E., 1997, *The End of The Peasantry in Southeast Asia: A Social and Economic History of Peasant Livelihood 1800-1990's*, Canberra: Australian National University.
- Eyken, A.J.H., 1909, *Het Boschewezen in Nederlandsche Indie*, 'S-Gravenhage: M. van der Beek's Boekhandel.
- F. A. Sutjipto Tiptoadmodjo, 1983, "Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX)", *disertasi doctoral*, Universitas Gadjah Mada.
- Van Gelden, W., en Lekkerkerker, C., 1928, *School Atlas van Nederlandsch-Indie*, Groningen, Den Haag, Weltevreden: J.B. Wolters.
- Gustami, SP., 2000, *Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara: kajian Estetik Melalui Pendekatan Multidisiplin*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Hefner, R.W., 1990, *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- De Graaf, H.J. & Pigeaud, Th., 1985, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Jakarta: Grafiti.
- Kian, K.H., 2006, *The Political Economy of Java's Northeast Coast, s. 1740-1800: Elite Sinergy*, Leiden, Boston: Brill.
- Muhajirin, 2018, "Respon Adaptif Masyarakat Perajin Seni Ukir Jepara", *disertasi doctoral*, Program Studi Pendidikan Seni, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Oudraad, J.L., 1925, *Ngelmoe Boemi Indija Wetan*, Tjap-Tjapan ping pindo, Groningen, Den Hage: Weltevreden.
- Wolterbeek, J.D., 1995, *Babad Zending di Pulau Jawa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen